

**PENGARUH BELANJA MODAL, INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
TERHADAP ANGKA KEMISKINAN: STUDI DATA
SEKUNDER PADA SWP GERBANGKERTOSUSILA TAHUN
2010 – 2019**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Ahmad Naufal Ariansyah

175020100111038



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS
BRAWIJAYA MALANG**

2021

**PENGARUH BELANJA MODAL, INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM), DAN TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA (TPT) TERHADAP ANGKA KEMISKINAN: STUDI
DATA SEKUNDER PADA SATUAN WILAYAH
PEMBANGUNAN (SWP) GERBANGKERTOSUSILA TAHUN
2010-2019**

Ahmad Naufal Ariansyah, Eddy Suprpto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: naufalariansyah15@gmail.com

ABSTRAK

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila merupakan salah satu kawasan SWP terbesar pertama di Provinsi Jawa Timur dan menjadi SWP terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. SWP Gerbangkertosusila terdiri atas 5 kabupaten dan 2 kota, antara lain Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Lamongan, Kab. Mojokerto, Kab. Lamongan, Kab. Sidoarjo, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. Kota Surabaya berkedudukan sebagai kota satelit atau pusat pelayanan. Pembentukan SWP Gerbangkertosusila dilandasi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur yang lalu diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031 dan Peraturan Pemerintah No.47/1997 tentang RTRW Nasional untuk mewujudkan pemerataan serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Akan tetapi, tujuan tersebut belum tercapai secara optimal yang salah satu indikatornya adalah masih tingginya tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian lebih mendalam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh variabel belanja modal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dianggap sebagai instrumen yang mampu mengentaskan masalah kemiskinan yang ada. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif korelasional. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPk Kemenkeu). Data diolah menggunakan alat Eviews 9 dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terpilih dalam penelitian ini yaitu Random Effect Model (REM). Hasil penelitian yang diperoleh bahwa variabel Belanja Modal (X1), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Sektor Kunci atau Key Sector (D) tidak signifikan sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X2) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen (Y) kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Sektor Kunci, SWP Gerbangkertosusila*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dalam suatu wilayah erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi yang ditafsirkan dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial. Menurut Todaro (2000) pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan struktur sosial, kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Simatupang dan Dermoredjo (2003) melaporkan bahwa pembangunan harus dilakukan secara berkesinambungan serta terpadu sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan berpedoman pada target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, terciptanya kesejahteraan dengan turunnya tingkat kemiskinan menjadi salah satu sasaran pembangunan.

Kemiskinan menjadi masalah utama pada tiap periode pemerintahan khususnya di negara berkembang. Kondisi tersebut juga terjadi pada sebagian besar wilayah di Indonesia, termasuk salah satu Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Provinsi Jawa Timur yaitu SWP Gerbangkertosusila. SWP Gerbangkertosusila terdiri atas tujuh daerah, antara lain Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya,

Kab. Sidoarjo, dan Kab. Lamongan dengan menjadikan Kota Surabaya sebagai pusat pelayanan atau kota satelit. Pembentukan SWP Gerbangkertosusila didasari oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan PP No.47/1997 tentang RTRW Nasional untuk mewujudkan pemerataan serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Menurut Glaeser dan Khan dalam Fitriyah dan Rachmawati (2013) melaporkan bahwa SWP Gerbangkertosusila memiliki keunggulan dalam kedekatan antar lokasi serta adanya sektor unggulan berupa industri. Kondisi tersebut membuat SWP Gerbangkertosusila sebagai kawasan metropolitan terbesar kedua setelah Jabodetabek serta menjadi etalase Provinsi Jawa Timur dalam bidang industri dan jasa. Tujuan dari pembentukan SWP Gerbangkertosusila menurut JICA (*Japan International Cooperation Agency*) Team (2011) diinterpretasikan sebagai berikut: **Pertama**, mewujudkan suatu kawasan yang dikenali dunia sehingga dapat menarik perhatian dan investasi. **Kedua**, sebagai suatu sarana dalam meningkatkan sistem jaringan transportasi dan arus logistik yang efisien. **Ketiga**, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang dengan memperhatikan keberlanjutan baik dari segi lingkungan dan perekonomian lokal secara seimbang. **Keempat**, menciptakan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berwawasan serta berdaya saing.

Pada Tahun 2020, rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 11,09%. Lalu masing-masing daerah di SWP Gerbangkertosusila dijabarkan sebagai berikut, Kab. Gresik (12,40%), Kab. Bangkalan (20,56%), Kab. Mojokerto (10,57%), Kota Mojokerto (6,24%), Kota Surabaya (5,02%), Kab. Sidoarjo (5,59%), dan Kab. Lamongan (13,85%). Maka dapat dilaporkan bahwa terdapat tiga kabupaten, yaitu Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, dan Kab. Lamongan yang memiliki persentase tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Lalu, berdasarkan kemampuan dalam menurunkan angka kemiskinan bahwa rata-rata penurunan Provinsi Jawa Timur dalam kurun 10 tahun (Tahun 2010-2019) sebesar -3.9% sedangkan SWP Gerbangkertosusila sebesar -3.8%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tujuan dari SWP Gerbangkertosusila sebagai salah satu upaya menciptakan kesejahteraan dengan pengurangan angka kemiskinan belum tercapai optimal. Dampak kemiskinan menurut Arsyad (2016) diwujudkan dalam bentuk kekurangan gizi, air, tempat tinggal yang tidak sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya menggunakan instrumen-instrumen dalam menurunkan angka kemiskinan.

Instrumen-instrumen yang dianggap mampu menurunkan angka kemiskinan, antara lain belanja modal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Tahun 2019 bahwa mayoritas daerah di SWP Gerbangkertosusila memiliki porsi belanja modal terhadap total belanja cenderung kecil (< 20%) dan porsi belanja langsung yang lebih kecil daripada belanja tidak langsung. Kondisi tersebut menjadi penghambat dalam upaya penciptaan kesejahteraan melalui pengurangan angka kemiskinan karena belanja modal sebagai bagian dari belanja langsung memiliki pengaruh secara langsung terhadap pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas bagi masyarakat dalam perekonomian.

IPM memiliki peran yang penting dalam menilai kualitas dan kinerja pemerintah dalam pembangunan SDM karena memiliki peran yang penting dalam perekonomian yaitu sebagai subjek dan objek dalam perekonomian. Pada Tahun 2020 rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 71,71, lalu masing-masing daerah di SWP Gerbangkertosusila dijabarkan sebagai berikut, Kab. Gresik (76,11), Kab. Bangkalan (64,11), Kab. Mojokerto (73,83), Kota Mojokerto (78,04), Kota Surabaya (82,23), Kab. Sidoarjo (80,29), dan Kab. Lamongan (72,58). Dapat dilaporkan masih terdapat daerah yang berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur, yaitu Kab. Bangkalan sehingga menandakan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam kualitas SDM sehingga dapat menghambat kesejahteraan.

Terdapat permasalahan lain yang ada di SWP Gerbangkertosusila yaitu bertambahnya jumlah angkatan kerja namun tidak disertai pembangunan yang merata dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang menyebabkan terjadi pengangguran yang digambarkan melalui TPT. Menurut Todaro (2003) bahwa masalah pengangguran menyebabkan tingkatan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal. Ketika seseorang menganggur maka akan terjadi penurunan standar hidup yang disebabkan oleh tidak ada atau kecilnya pendapatan yang diperoleh. Pada Tahun 2020 rata-rata TPT Provinsi Jawa Timur sebesar 5,84% dan masing-masing daerah di SWP Gerbangkertosusila memiliki TPT sebagai berikut, Kab. Gresik (8,21%), Kab. Bangkalan (8,77%), Kab. Mojokerto (5,75%), Kota Mojokerto (6,74%), Kota Surabaya (9,79%), Kab. Sidoarjo (10,97%), dan Kab. Lamongan (5,13%). Dapat dilaporkan bahwa terdapat 5 daerah yang memiliki TPT di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Padahal di masing-masing daerah memiliki kawasan industri *estate*, tentu kondisi tersebut tidak baik bagi kawasan yang menjadi metropolitan kedua terbesar setelah Jabodetabek dan sebagai etalase Provinsi Jawa Timur dalam bidang industri dan jasa.

Masing-masing daerah di SWP Gerbangkertosusila memiliki sektor kunci atau *key sector* yang menjadi sektor andalan dalam perekonomiannya. Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2019 diperoleh hasil bahwa mayoritas daerah memiliki sektor kunci sebagai sektor andalan dalam perekonomian adalah sektor industri dan jasa. Oleh karena itu, juga perlu diketahui mengenai peran sektor kunci dalam upaya penciptaan kesejahteraan dengan salah satu indikatornya menurunnya angka kemiskinan. Berdasarkan kondisi permasalahan yang ada maka dapat diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila Tahun 2010-2019?
2. Bagaimana pengaruh IPM terhadap kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila Tahun 2010-2019?
3. Bagaimana pengaruh TPT terhadap kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila Tahun 2010-2019?
4. Bagaimana pengaruh sektor kunci atau *key sector* terhadap kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila Tahun 2010-2019?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila Tahun 2010-2019.
2. Mengetahui pengaruh IPM terhadap kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila Tahun 2010-2019.
3. Mengetahui pengaruh TPT terhadap kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila Tahun 2010-2019.
4. Mengetahui pengaruh sektor kunci atau *key sector* terhadap kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila Tahun 2010-2019.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian berjudul **Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Angka Kemiskinan (Studi Data Sekunder pada SWP Gerbangkertosusila Tahun 2010-2019)**.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Ekonomi

Menurut Todaro (2000) bahwa pembangunan secara garis besar merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan struktur sosial, kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan pada suatu daerah ataupun negara memiliki nilai – nilai pokok sebagai indikator, menurut Todaro (2000) beberapa indikator tersebut, antara lain:

- Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok (*sustenance*).
- Meningkatkan rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Mahfud dalam Simanjuntak (2013) melaporkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Wewenang desentralisasi memberikan pemerintah daerah keleluasaan dan kebebasan dalam mengurus urusan serta kebutuhan daerahnya sendiri sehingga termasuk dalam strategi pengelolaan secara *bottom up*. Implementasi dari desentralisasi adalah otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Haris (2007) ialah kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya secara mandiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Kemiskinan

Menurut Ritonga (2003) kemiskinan merupakan kondisi kehidupan seseorang atau rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Kemiskinan juga diklasifikasikan menurut sifatnya, menurut Todaro (2008) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

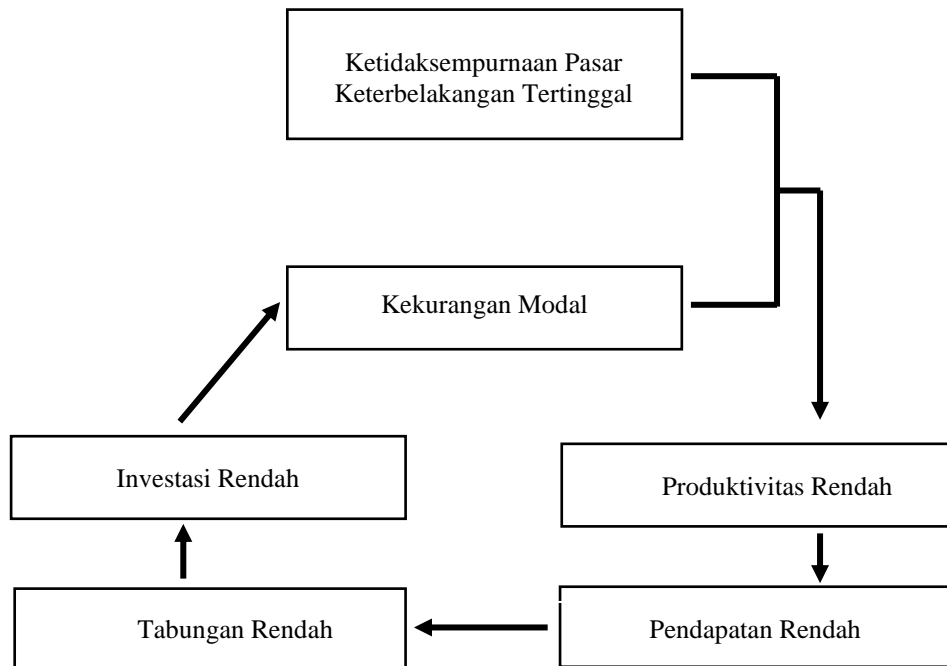
- **Kemiskinan absolut** merupakan kondisi masyarakat yang hidup di bawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- **Kemiskinan relatif** merupakan kondisi masyarakat meskipun tingkat pendapatan sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih tetap jauh lebih rendah dibandingkan keadaan masyarakat sekitarnya.

Menurut Arsyad (2016) bahwa dimensi dari dampak kemiskinan diwujudkan dalam bentuk kekurangan gizi, air, tempat tinggal yang tidak sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*)

Kemiskinan disebabkan oleh banyak hal, menurut Sharp dkk. dalam Kuncoro (2000) penyebab kemiskinan yang **Pertama**, secara makro kemiskinan muncul karena adanya perbedaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. **Kedua**, perbedaan kualitas sumber daya manusia mengakibatkan produktivitas juga rendah sehingga upahnya pun rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia antara lain disebabkan oleh kurangnya pendidikan, kurangnya kesehatan, dan kurangnya kesempatan untuk memperoleh hak dasar. **Ketiga**, kemiskinan terjadi dikarenakan adanya perbedaan akses dan modal. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut mengacu pada teori lingkaran setan (*vicious circle of poverty*) kemiskinan oleh Ragnar Nurkse (1953). Nurkse dalam Kuncoro (2000) mengungkapkan sebuah logika bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*).

Gambar 1: Diagram Teori Lingkaran Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) Ragnar Nurkse (1953)



Sumber: Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2000), 2020 (Diolah)

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat diketahui bahwa awal dari proses kemiskinan yaitu adanya keterbelakangan/keteringgalan dan ketidaksempurnaan pasar serta kurangnya modal di masyarakat. Faktor-faktor tersebut selanjutnya berpengaruh pada rendahnya produktivitas dari total penduduk yang dalam penelitian ini digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di dalamnya terdapat aspek pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan layak yang dapat mempengaruhi produktivitas dari sumber daya manusia yang ada. Produktivitas yang rendah mengakibatkan pendapatan masyarakat rendah sehingga memberikan implikasi pada rendahnya tabungan dan investasi serta memunculkan kondisi kemiskinan.

Pendapatan yang rendah dalam penelitian ini digambarkan melalui TPT karena ketika seseorang menganggur maka akan memiliki kecenderungan mendapatkan pendapatan rendah atau bahkan tidak mendapatkan pendapatan sama sekali. Keadaan tersebut membuat tingkat investasi baik dari penduduk ataupun pemerintah berada pada kondisi rendah atau tidak optimal sehingga dapat memperburuk kondisi perekonomian. Investasi dalam penelitian ini digambarkan melalui belanja modal sebagai salah satu investasi pemerintah dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas dalam rangka menunjang pembangunan. Oleh karena itu, menurut Kuncoro (2000) segala upaya harus dilakukan dengan terkonsentrasi pada perang melawan kemiskinan yang bertujuan memutus lingkaran perangkap kemiskinan.

Belanja Modal

Menurut Halim (2014) Belanja Modal merupakan salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. PMK No. 134/PMK.02/2012 sebagai pengganti dari PMK No. 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran dijelaskan bahwa belanja modal dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik. Kegunaan tersebut membuat belanja modal dianggap sebagai penstimulasi dalam pembangunan ekonomi daerah. Selaras dengan pendapat mengenai belanja modal menurut Halim dan Damayanti (2007) bahwa belanja modal dianggap mampu memberikan pengaruh langsung terhadap kepentingan publik, mampu menggerakkan dan menstimulus jalannya perekonomian masyarakat serta mampu menciptakan efisien.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut *United Nation Development Programme* (1990) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia. *United Nation Development Programme* (1990) mengungkapkan bahwa pembangunan manusia merupakan pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Pendapat tersebut selaras dengan Deolalikar (1997) bahwa adanya investasi sumber daya manusia dapat meningkatkan kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kenaikan produktivitas penduduk. Menurut Statistik, Direktorat Analisis dan Pengembangan (2015) IPM yang dicapai oleh antar wilayah dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu:

- $IPM < 60$: IPM rendah
- $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang
- $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi
- $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi

Krugman (1994) berpendapat bahwa investasi sumber daya manusia menjadi lebih penting perannya dalam pembangunan. Modal manusia atau *human capital* memiliki peran yang sangat penting karena manusia memiliki peran ganda dalam perekonomian yaitu sebagai subjek ekonomi dan objek ekonomi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran menurut Sukirno (1994) merupakan suatu keadaan seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Menurut Mankiw (2006) pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis, selaras dengan pendapat Todaro (2003) bahwa masalah pengangguran yang menyebabkan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal sehingga menjadi masalah pokok makroekonomi yang paling utama. Ketika seseorang menganggur maka akan terjadi penurunan standar hidup karena seseorang hanya memiliki pendapatan yang kecil atau sama sekali tidak memiliki pendapatan sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Tingkat pengangguran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu TPT. Tingkat pengangguran menurut Mankiw (2006) merupakan persentase orang-orang yang ingin bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan. Selanjutnya menurut BPS (2020) bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Sektor Kunci atau *Key Sector*

Menurut Simatupang dan Syafa'at dalam Tambunan (2003) bahwa sektor andalan yang juga disebut sektor kunci perekonomian adalah sektor yang memiliki ketangguhan tinggi. Sektor kunci merupakan tulang punggung (*backbone*) dan mesin penggerak perekonomian (*engine of growth*) sehingga juga dianggap sebagai sektor pemimpin (*leading sector*) perekonomian. Menurut Simatupang dan Syafa'at dalam Tambunan (2003) terdapat lima syarat yang harus dilihat sebagai kriteria suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci, antara lain strategis, tangguh, artikulatif, progresif, dan responsif.

Daerah-daerah di SWP Gerbangkertosusila memiliki dua sektor yang dianggap sebagai sektor kunci yaitu sektor industri dan jasa dan sektor pertanian. Menurut Dumairy (1996) bahwa **pertama**, sektor industri diartikan sebagai himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, lalu yang **kedua** industri dapat merujuk ke suatu sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Sektor pertanian menurut Mosher (1968) bahwa pertanian adalah proses produksi yang memiliki kekhasan dimana usahanya harus berhubungan dengan tanaman dan hewan.

Pada penelitian ini penentuan sektor kunci yang dimiliki oleh daerah yaitu dengan menggunakan analisis terhadap PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha. PDRB ADHK menurut lapangan usaha digunakan karena lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut. Sektor kunci dalam penelitian menggunakan satuan nominal berupa *dummy variable* sehingga terdapat dua pilihan, antara lain 1 dan 0. Daerah dengan sektor kunci industri dan jasa dianggap menggambarkan kondisi SWP Gerbangkertosusila yang dikenal sebagai etalase Provinsi Jawa Timur khususnya dalam bidang industri dan jasa sehingga mendapatkan angka 1. Sedangkan daerah dengan sektor kunci berupa pertanian mendapatkan angka 0.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Timur, BPS Kota Pasuruan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPk Kemenkeu). Pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif korelasional. Pendekatan kuantitatif menitikberatkan pada analisis data bersifat numerik dari pengumpulan data hingga penampilan hasil. Selanjutnya pendekatan korelasional dilakukan untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang digunakan. Objek lokasi penelitian dalam penelitian ini merupakan

salah satu SWP di Provinsi Jawa Timur yaitu SWP Gerbangkertosusila dan objek tahun yang digunakan yaitu Tahun 2010-2019.

Data yang telah diperoleh dilakukan pengolahan menggunakan metode regresi data panel dengan aplikasi Eviews 9 sebagai alat. Tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data meliputi: **Pertama**, melakukan pengujian konsistensi *Ordinary Least Square* (OLS) dengan dua aspek yaitu Uji Kausalitas Granger dan Uji Simultanitas Hausman. **Kedua**, setelah kedua tahapan lolos (tidak signifikan) lalu dilanjutkan ke tahap pemilihan model, antara lain *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pada tahap awal melakukan pengujian menggunakan CEM dan FEM lalu dilakukan Uji *Chow* untuk menentukan model yang terbaik diantara keduanya. Selanjutnya setelah ditemukan model terbaik diantara keduanya maka dilakukan pengujian REM, setelah dihasilkan estimasi maka dilakukan Uji Hausman untuk memilih yang terbaik diantara FEM dan REM. Lalu dilakukan Uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk memilih yang terbaik diantara CEM dan REM. **Ketiga**, setelah didapatkan model terbaik yang digunakan dalam penelitian maka melakukan tahap selanjutnya yaitu uji asumsi klasik untuk memperoleh estimator yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), terdiri atas Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, dan Uji Multikolinearitas. **Keempat**, setelah melakukan uji asumsi klasik maka dilakukan uji hipotesis menggunakan Uji T Statistik (Parsial), Uji F Statistik (Simultan), dan Uji Koefisien Determinasi (R^2).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Kewilayahan Penelitian

SWP Gerbangkertosusila merupakan salah satu kawasan SWP terbesar pertama di Provinsi Jawa Timur dan menjadi SWP terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Luas wilayah yang dimiliki SWP Gerbangkertosusila yaitu 5.925,86 km² dengan proyeksi jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebesar 9.953.261 jiwa atau setara dengan 24,9% total penduduk Provinsi Jawa Timur. SWP Gerbangkertosusila terdiri atas 5 kabupaten dan 2 kota, antara lain Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Lamongan, Kab. Mojokerto, Kab. Lamongan, Kab. Sidoarjo, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. Kota Surabaya berkedudukan sebagai kota satelit atau pusat pelayanan.

Pembentukan SWP Gerbangkertosusila dilandasi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur yang lalu diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031 dan Peraturan Pemerintah No.47/1997 tentang RTRW Nasional untuk mewujudkan pemerataan serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, SWP Gerbangkertosusila berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). PKN berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, kegiatan nasional, atau kegiatan beberapa provinsi. Selain itu, SWP Gerbangkertosusila juga menjadi etalase Provinsi Jawa Timur khususnya dalam bidang perindustrian dan jasa.

Tujuan dibentuknya SWP Gerbangkertosusila menurut JICA Team (2011) dapat diinterpretasikan sebagai berikut: **Pertama**, mewujudkan suatu kawasan yang dikenali dunia sehingga dapat menarik perhatian dan investasi. **Kedua**, sebagai suatu sarana dalam meningkatkan sistem jaringan transportasi dan arus logistik yang efisien. **Ketiga**, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang dengan memperhatikan keberlanjutan baik dari segi lingkungan dan perekonomian lokal secara seimbang. **Keempat**, menciptakan dan mengembangkan SDM yang berwawasan serta berdaya saing.

Sektor Kunci atau Key Sector Masing-Masing Daerah di SWP Gerbangkertosusila

Pembentukan SWP yang ada di Provinsi Jawa Timur didasarkan pada potensi sektor unggulan masing-masing daerah. SWP Gerbangkertosusila memiliki 4 sektor unggulan yang terbagi ke dalam dua grup sektor yang menjadi variabel *dummy* dalam penelitian ini yaitu sektor industri dan pariwisata (grup industri & jasa) berkode 1 serta sektor pertanian dan perikanan (grup pertanian) berkode 0. Penentuan mengenai sektor kunci sebagai potensi unggulan dari tiap daerah dilihat melalui persentase distribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2020.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat dilaporkan bahwa mayoritas daerah di SWP Gerbangkertosusila memiliki *key sector* yang menjadi sektor andalan dalam perekonomian yaitu sektor industri dan jasa. Daerah yang memiliki *key sector* dalam sektor industri dan jasa, antara lain Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo. Sedangkan daerah yang memiliki *key sector* dalam sektor pertanian, antara lain Kab. Bangkalan dan Kab. Lamongan.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu pos atau bagian belanja langsung yang dianggarkan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kota/Kabupaten di SWP Gerbangkertosusila dalam rangka pembangunan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan melalui pengurangan angka kemiskinan. Peran belanja modal menjadi penting karena berhubungan langsung dalam

proses pembangunan fasilitas dan sarana prasarana serta insentif yang dilakukan oleh suatu pemerintahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari DJPK Kemenkeu dalam kurun waktu 10 tahun (Tahun 2010-2019) dapat dilaporkan bahwa porsi belanja modal terhadap total belanja mayoritas daerah cukup kecil (< 20%).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator tolak ukur mengenai kualitas pembangunan manusia suatu wilayah baik dari aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai acuan. SDM sebagai subjek dan objek ekonomi memiliki peran yang sangat penting dan vital dalam jalannya perekonomian di suatu wilayah. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Jawa Timur dapat dilaporkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun IPM masing-masing daerah mengalami peningkatan, akan tetapi terdapat satu daerah yaitu Kab. Bangkalan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran menjadi salah satu masalah yang selalu ada dalam tiap negara, khususnya negara berkembang. Ketika seseorang dalam kondisi menganggur maka pendapatan yang diperoleh kecil atau bahkan tidak ada pendapatan sehingga dapat menghambat dalam pencapaian kesejahteraan di suatu wilayah dan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Jawa Timur bahwa dalam kurun waktu 10 tahun masih terdapat daerah yang memiliki TPT di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, antara lain Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Mayoritas daerah yang memiliki TPT di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur memiliki sektor kunci berupa industri dan jasa.

Kemiskinan

Kemiskinan menjadi permasalahan utama seluruh negara di dunia khususnya negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia khususnya studi kasus dalam penelitian ini yaitu SWP Gerbangkertosusila. Mayoritas masyarakat yang mengalami kemiskinan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal seperti sandang, pangan, dan papan secara layak. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Jawa Timur bahwa selama 10 tahun secara statistik mengalami penurunan. Akan tetapi masih terdapat 3 daerah yang memiliki kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, antara lain Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, dan Kab. Lamongan.

Uji Kausalitas Granger

Tabel 1: Hasil Uji Kausalitas Granger

Variabel	Prob.	Keterangan
Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0.3426	Tidak terdapat hubungan kausalitas antara kemiskinan terhadap IPM
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan	0.1759	Tidak terdapat hubungan kausalitas antara IPM terhadap kemiskinan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021 (Penulis)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilaporkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas baik antara kemiskinan terhadap IPM dan IPM terhadap kemiskinan karena keduanya memiliki nilai probabilitas $\geq \alpha = 0.05$.

Uji Simultanitas Hausman

Terdapat dua teori yang berbeda dalam penelitian ini, **Pertama**, menurut Krugman (1994) bahwa investasi sumber daya manusia menjadi lebih penting perannya dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan. **Kedua**, bahwa menurut Sitepu dan Sinaga (2012) bahwa rendahnya produktivitas kaum miskin disebabkan oleh rendahnya akses mereka dalam memperoleh Pendidikan. Kondisi tersebut mengharuskan dilakukan uji simultanitas agar dapat menghasilkan estimator OLS yang konsisten dan efisien.

Tabel 2: Hasil Uji Simultanitas Hausman

Variabel	Prob	Keterangan
X2	0.0000	Tidak ada masalah simultanitas antara IPM dan Kemiskinan
RES	0.1370	
C	0.0000	

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021 (Penulis)

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Tabel 3: Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.290815	3	0.5143

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021 (Penulis)

Berdasarkan hasil pada tabel 3 di atas diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.5143 atau $\geq \alpha = 0.05$ sehingga REM lebih baik dari FEM. Maka model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu REM. Berikut ditampilkan mengenai hasil estimasi menggunakan REM.

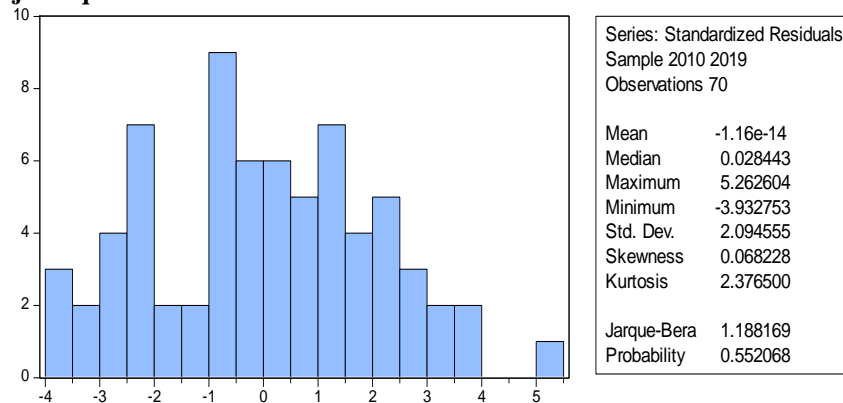
Tabel 4: Hasil Estimasi REM

Variabel	R-Square	F Test		Koefisien	T Test		Keterangan
		F-Statistic	Prob.		T-Statistic	Prob.	
C	0.756408	50.45993	0.000	66.07799	15.83698	0.000	Signifikan
X1				0.031152	-12.30860	0.174	Tidak Signifikan
X2				-0.717718	0.058310	0.000	Signifikan
X3				-0.146218	-1.438765	0.155	Tidak Signifikan
KEYSECTOR				-3.376875	-1.631034	0.107	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021 (Penulis)

Uji Normalitas

Gambar 2: Hasil Uji Jarque Bera



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021 (Penulis)

Berdasarkan gambar 1 di atas maka dapat dilaporkan bahwa diperoleh nilai probabilitas 0.552068 atau $\geq \alpha = 0.05$ sehingga residual data terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Tabel 5: Hasil Uji Run

R1	16.00000
R2	2.16E-05

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021 (Penulis)

Berdasarkan tabel 5 di atas maka dapat dilaporkan bahwa nilai R2 sebagai probabilitas memiliki nilai $\geq \alpha = 0.05$ sehingga tidak terjadi masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6: Hasil Uji Harvey

F-statistic	2.357016	Prob. F (3,66)	0.0797
Obs*R-squared	6.773865	Prob. Chi-Square (3)	0.0795
Scaled Explained SS	6.575733	Prob. Chi-Square (3)	0.0867

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021 (Penulis)

Berdasarkan tabel 6 di atas maka dapat dilaporkan bahwa nilai probabilitas F sebesar 0.0797 atau $\geq \alpha = 0.05$ sehingga tidak terindikasi masalah heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7: Hasil Uji Variance Inflation Factor (VIF)

Variabel	Centered VIF
X1	1.099598
X2	2.598599
X3	1.023344

KEYSECTOR	2.502323
-----------	----------

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021 (Penulis)

Berdasarkan tabel 7 di atas maka dapat dilaporkan bahwa tiap-tiap variabel memiliki nilai VIF ≤ 10.00 sehingga tidak terdeteksi masalah multikolinearitas.

Uji Statistik T (Parsial)

Tabel 8: Hasil Uji Statistik T REM

Variabel	R-Square	F Test		Koefisien	T Test		Ket.
		F-Statistic	Prob.		T-Statistic	Prob.	
C	0.756408	50.45993	0.000	66.07799	15.83698	0.000	Signifikan
X1				0.031152	-12.30860	0.174	Tidak Signifikan
X2				-0.717718	0.058310	0.000	Signifikan
X3				-0.146218	-1.438765	0.155	Tidak Signifikan
KEYSECTOR				-3.376875	-1.631034	0.107	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021 (Penulis)

Berdasarkan tabel 8 di atas maka dapat dijelaskan mengenai hasil Uji Statistik T masing-masing variabel bebas menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau $\alpha = 0.05$ sebagai berikut:

- Variabel belanja modal (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.174 atau $\alpha \geq 0.05$ yang berarti tidak signifikan sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila.
- Variabel IPM (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000 atau $\leq \alpha = 0.05$ yang berarti variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila dan memiliki nilai koefisien sebesar -0.717718 yang berarti setiap kenaikan 1% pada variabel IPM akan mengurangi kemiskinan sebesar -0.717718.
- Variabel TPT (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.155 atau $\geq \alpha = 0.05$ yang berarti tidak signifikan sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila.
- Variabel Sektor Kunci atau *Key Sector* (D) memiliki nilai probabilitas 0.107 atau $\geq \alpha = 0.05$ yang berarti tidak signifikan sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kemiskinan (Y) di SWP Gerbangkertosusila.

Uji Statistik F (Simultan)

Tabel 9: Hasil Uji Statistik F REM

F-Statistic	Prob (F-statistic)
50.45993	0.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021 (Penulis)

Berdasarkan pada tabel 9 di atas maka diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.000 atau $\leq \alpha = 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal, IPM, TPT, dan sektor kunci atau *key sector* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kemiskinan (Y) di SWP Gerbangkertosusila.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.756408
-----------	----------

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021 (Penulis)

Berdasarkan hasil tabel 10 di atas maka dapat dilaporkan diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan pengaruh sebesar 75,64% terhadap variabel dependennya sedangkan sisanya yaitu sebesar 24,36% dipengaruhi oleh sesuatu di luar model.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila

Variabel belanja modal (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.174 atau $\alpha \geq 0.05$ yang berarti tidak signifikan sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Hasil tersebut bertentangan dengan teori mengenai belanja modal menurut Halim dan Damayanti (2007) bahwa belanja modal dianggap mampu memberikan pengaruh langsung terhadap kepentingan publik, mampu menggerakkan dan menstimulus jalannya perekonomian masyarakat serta mampu menciptakan efisien sehingga diharapkan mampu menurunkan kemiskinan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, berikut ditampilkan pada tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11: Persentase Porsi Belanja Modal, Belanja Langsung, dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Tahun 2019

Daerah	Porsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun 2019	Porsi Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Tahun 2019	Porsi Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Tahun 2019
Kab. Gresik	18.05%	44.9%	55.1%
Kab. Bangkalan	18.01%	44.3%	55.7%
Kab. Mojokerto	21.28%	46.5%	53.5%
Kota Mojokerto	15.80%	59.7%	40.3%
Kota Surabaya	30.06%	76.3%	23.7%
Kab. Sidoarjo	18.42%	51.5%	48.5%
Kab. Lamongan	17.06%	41.8%	58.2%

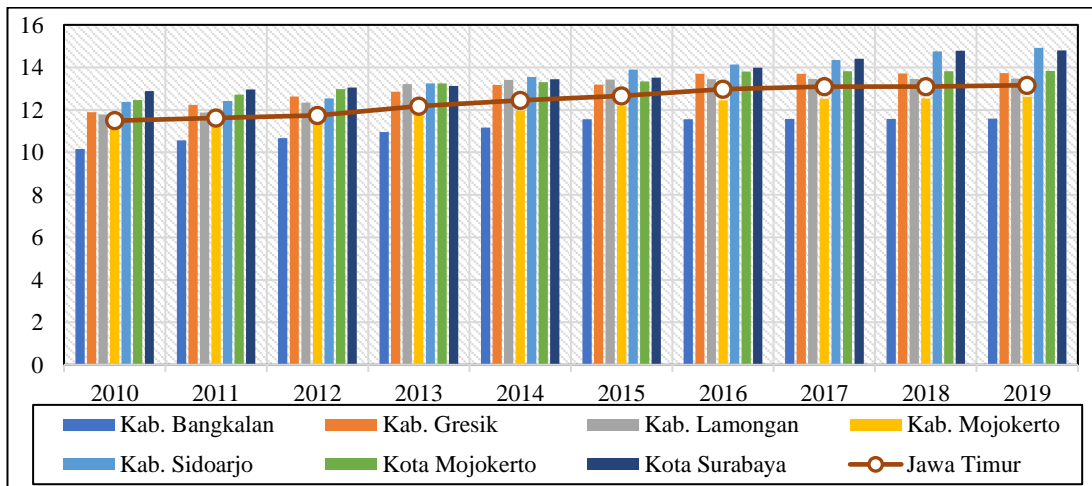
Sumber: DJPK Kemenkeu, 2021 (Diolah)

Berdasarkan tabel 11 di atas dapat dilaporkan bahwa mayoritas daerah di SWP Gerbangkertosusila memiliki porsi belanja langsung yang lebih kecil daripada belanja tidak langsung dan memiliki porsi belanja modal terhadap total belanja yang juga kecil ($< 20\%$). Kondisi tersebut berdampak pada: **Pertama**, mengakibatkan terjadi keterbatasan dana dalam melakukan pembangunan sehingga salah satu aspek pembangunan dalam suatu daerah yaitu *value for money* (*input, output, dan outcome*) tidak tercapai optimal. **Kedua**, kecilnya porsi belanja modal terhadap belanja total menghambat penyediaan fasilitas bagi masyarakat tidak berjalan optimal dan *outcome* atau luaran yang diharapkan berupa peningkatan produktivitas ekonomi serta penciptaan kesejahteraan melalui penurunan kemiskinan tidak tercapai optimal. Faktor tersebut yang membuat variabel belanja modal tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh terhadap variabel dependen kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila

Variabel IPM (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000 atau $\leq \alpha = 0.05$ yang berarti variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila dan memiliki nilai koefisien sebesar -0.717718 yang berarti setiap kenaikan 1% pada variabel IPM akan mengurangi kemiskinan sebesar -0.717718. Hasil tersebut selaras dengan teori menurut Krugman (1994) bahwa investasi sumber daya manusia menjadi lebih penting perannya dalam pembangunan. Modal manusia atau *human capital* memiliki peran yang sangat penting karena manusia memiliki peran ganda dalam perekonomian yaitu sebagai subjek ekonomi dan objek ekonomi. Maka pembangunan manusia menjadi salah satu hal yang utama dalam pencapaian kesejahteraan. Keselarasan hasil pengolahan data dengan teori didukung oleh beberapa hal diantaranya:

Gambar 3: Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Tahun 2010-2019



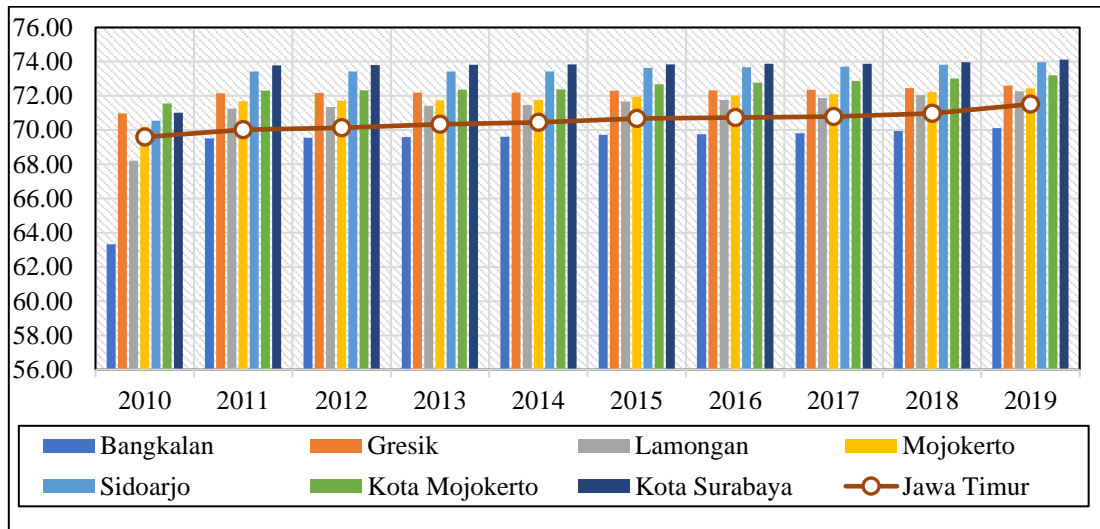
Sumber: BPS Jawa Timur, 2021 (Diolah)

Salah satu instrumen pembentuk IPM adalah aspek pendidikan yang dalam penelitian ini digambarkan melalui Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS Menurut BPS (2021) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Berdasarkan gambar 2 di atas dapat dilaporkan bahwa mayoritas daerah dalam kurun waktu 10 tahun secara grafik selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata mayoritas 12-14 tahun masa pendidikan. Akan tetapi, terdapat dua daerah yang memiliki AHLS di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yaitu Kab. Bangkalan dan Kab. Mojokerto. Kondisi tersebut menandakan bahwa mayoritas daerah di SWP Gerbangkertosusila memiliki kualitas SDM memiliki pendidikan yang mumpuni sehingga dapat mendukung dan memberikan kemudahan

dalam proses pembangunan dengan tetap dilakukan percepatan pada dua daerah yang berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur agar kualitas SDM-nya mampu setara dengan daerah lain.

Selain aspek pendidikan, maka terdapat aspek Kesehatan sebagai instrumen pembentuk IPM yang dalam penelitian ini digambarkan melalui Angka Harapan Hidup (AHH). AHH menurut BPS (2021) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Berikut ditampilkan kondisi AHH masing-masing daerah di SWP Gerbangkertosusila Tahun 2010-2019.

Gambar 4: **Angka Harapan Hidup Tahun 2010-2019**



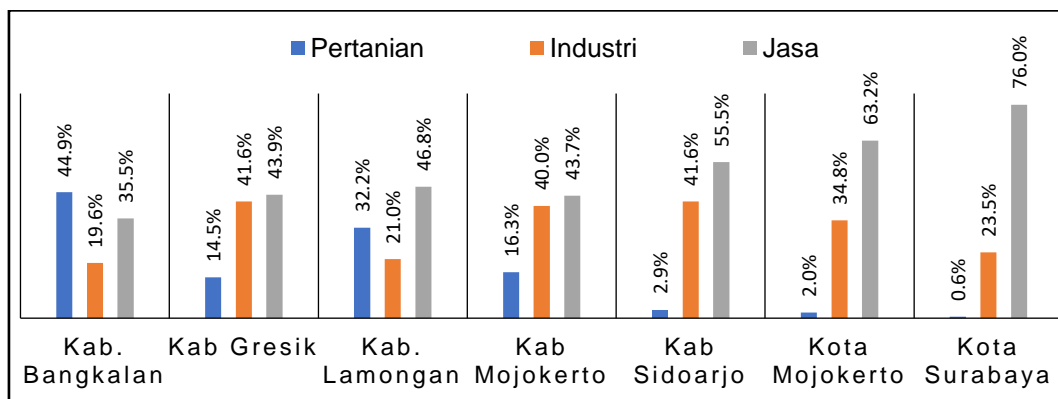
Sumber: BPS Jawa Timur, 2021 (Diolah)

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilaporkan bahwa tingkat AHH mayoritas daerah di SWP Gerbangkertosusila dalam kurun waktu 10 tahun semakin meningkat dan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, masih terdapat satu daerah yang berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yaitu Kab. Bangkalan. Kondisi tersebut menandakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan penduduknya cukup optimal dengan tetap memberikan stimulus dalam bidang kesehatan khususnya untuk daerah Kab. Bangkalan khususnya agar memiliki kualitas kesehatan SDM yang setara dengan daerah lain. Mengingat SDM memiliki peran yang penting dalam perekonomian yaitu sebagai subjek dan objek ekonomi. Faktor-faktor tersebut yang membuat IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila

Variabel TPT (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.155 atau $\geq \alpha = 0.05$ yang berarti tidak signifikan sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Hasil tersebut bertentangan dengan teori menurut Todaro (2003) bahwa masalah pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal. Ketika seseorang menganggur maka akan terjadi penurunan standar hidup sehingga seseorang mengalami kemiskinan serta akan mengurangi pendapatan nasional. Ketidakselarasan hasil penelitian dengan teori disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut.

Gambar 5: **Porsi Tenaga Kerja yang Bekerja Berdasarkan Bidang Lapangan Kerja Tahun 2019**



Sumber: BPS Jawa Timur, 2021 (Diolah)

Berdasarkan gambar 4 di atas bahwa dalam distribusi penyebaran tenaga kerja tidak optimal karena mayoritas tenaga kerja terserap di sektor jasa daripada sektor industri ataupun sektor pertanian. Sektor industri yang menjadi ciri khas dari SWP Gerbangkertosusila khususnya dalam bidang industri manufaktur yang melakukan proses produksi dari awal hingga akhir diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja, akan tetapi masih lebih rendah daripada dalam sektor jasa. Lalu berikut ditampilkan mengenai karakteristik kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dan tingkat pendidikan tertinggi Angkatan kerja yang bekerja.

Tabel 12: TPT Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020

Tahun	Perkotaan atau <i>Urban</i> (dalam %)	Pedesaan atau <i>Rural</i> (dalam %)
2018	4.55	3.23
2019	4.49	3.08
2020	7.37	4.13

Sumber: BPS Jawa Timur, 2021 (Diolah)

Berdasarkan tabel 12 di atas dapat dilaporkan bahwa selama kurun waktu 3 tahun (Tahun 2018-2020) persentase pengangguran perkotaan atau *urban* memiliki porsi yang lebih besar daripada pengangguran pedesaan atau *rural*. Kondisi pemusatan pengangguran di daerah perkotaan adalah adanya arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota yang memiliki keyakinan akan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak di perkotaan. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi bahwa penduduk yang melakukan urbanisasi tersebut menganggur karena memiliki kualitas di bawah spesifikasi yang dibutuhkan serta memiliki kehidupan yang tidak layak (tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar-nya). Selain itu terdapat faktor lain yang akan ditampilkan pada tabel 13 di bawah ini.

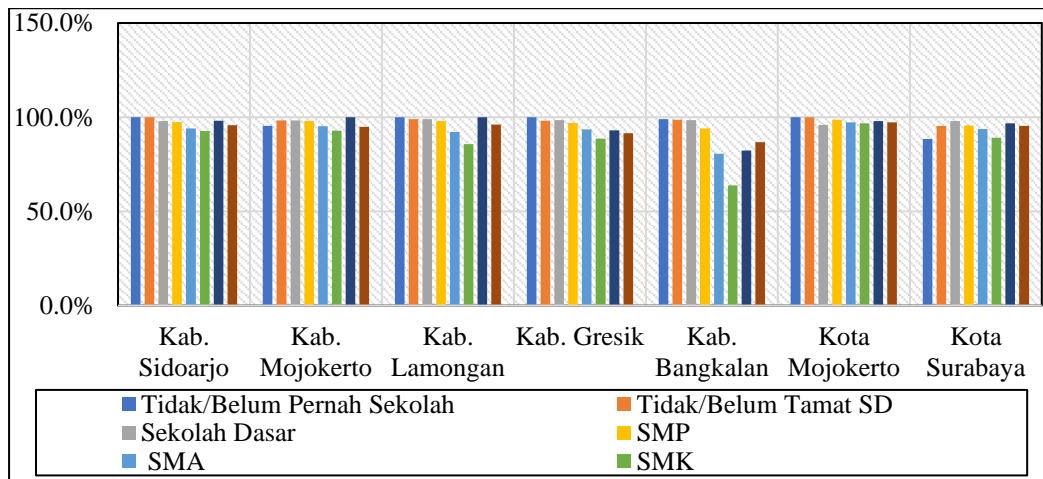
Tabel 13: Keadaan Bukan Angkatan Kerja berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2020

Jenis Kegiatan	Perkotaan atau <i>Urban</i> (Jiwa)	Pedesaan atau <i>Rural</i> (Jiwa)
Sekolah	1.269.811	825.587
Mengurus Rumah Tangga	3.363.652	2.538.033
Lainnya	762.320	634.696
Jumlah Total	5.395.783	3.998.316

Sumber: BPS Jawa Timur, 2021 (Diolah)

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja menurut BPS (2021) adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berdasarkan tabel 13 di atas dapat dilaporkan bahwa faktor lain selain arus urbanisasi adalah banyaknya penduduk perkotaan yang terpaksa menganggur dikarenakan harus melakukan kegiatan lain seperti keharusan melanjutkan studi (sekolah) dan menjadi pengurus rumah tangga yang meskipun menganggur mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar-nya (tidak masuk ke dalam kategori miskin). Selain itu, pengangguran yang ada tersebut disebabkan oleh permasalahan mengenai tingkatan pendidikan.

Gambar 6: Porsi Tenaga Kerja yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Tahun 2019



Sumber: BPS Jawa Timur, 2021 (Diolah)

Berdasarkan gambar 5 di atas dapat dilaporkan bahwa mayoritas pengangguran di beberapa daerah adalah berasal dari tingkat Pendidikan SMA, SMK, Diploma dan Perguruan Tinggi. Mayoritas tenaga kerja di jenjang sekolah tersebut memiliki tingkat upah yang cukup tinggi sehingga tidak banyak dipilih oleh perusahaan khususnya industri manufaktur karena dianggap memiliki kompetensi dan *cost* yang terlalu tinggi. Sedangkan dalam kegiatan operasional perusahaan ingin melakukan efisiensi dan optimalisasi dalam proses produksi baik dari waktu dan biaya. Kondisi tersebut mengakibatkan perusahaan baik industri ataupun jasa lebih banyak menggunakan teknologi mesin atau tenaga kerja yang memiliki *cost* lebih murah untuk digunakan dalam proses produksinya. Akan tetapi, pengangguran dari tingkat pendidikan tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang

cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar-nya (tidak termasuk ke dalam kategori miskin) sehingga banyak yang memilih untuk melanjutkan studinya. Faktor-faktor di atas yang mengakibatkan pengaruh variabel TPT tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh terhadap variabel dependen kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila.

Pengaruh Sektor Kunci atau *Key Sector* Terhadap Kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila

Variabel Sektor Kunci atau *Key Sector* (D) memiliki nilai probabilitas 0.107 atau $\geq \alpha = 0.05$ yang berarti tidak signifikan sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kemiskinan (Y) di SWP Gerbangkertosusila. Kondisi tersebut dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor.

Tabel 14: **Sektor Kunci Daerah di SWP Gerbangkertosusila**

Daerah	Industri dan Jasa (dalam%)	Pertanian (dalam %)	Sektor Lainnya (dalam %)
Kab. Gresik	52.4	6.2	41.4
Kab. Bangkalan	9.5	21.4	69.1
Kab. Mojokerto	59.8	6.7	33.5
Kota Mojokerto	27.8	0.6	71.6
Kota Surabaya	31.4	0.1	68.5
Kab. Sidoarjo	56.9	1.9	41.2
Kab. Lamongan	18.7	31.5	49.8

Sumber: BPS Jawa Timur, 2021 (Diolah)

Berdasarkan tabel 14 di atas dapat dilaporkan bahwa mayoritas daerah di SWP Gerbangkertosusila memiliki sektor kunci atau sektor andalan berupa bidang industri dan jasa sehingga menjadi etalase Provinsi Jawa Timur dalam bidang industri dan jasa. Penentuan sektor kunci tersebut berdasarkan PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha Tahun 2020. PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha dipilih karena lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut. Selanjutnya ditampilkan mengenai karakteristik kemiskinan yang terjadi.

Gambar 7: **Karakteristik Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Dalam %)**



Sumber: BPS Jawa Timur, 2021 (Diolah)

Berdasarkan gambar 6 di atas dapat dilaporkan bahwa karakteristik kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur mayoritas adalah kemiskinan pedesaan atau *rural* bukan kemiskinan perkotaan atau *urban*. Kondisi tersebut menyebabkan bahwa SWP Gerbangkertosusila yang merupakan perkotaan dengan sektor kunci berupa industri dan jasa kurang mampu menggambarkan kondisi kemiskinan yang terjadi sehingga mengakibatkan pengaruh variabel sektor kunci tidak signifikan terhadap variabel dependen angka kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh belanja modal, IPM, TPT, dan sektor kunci terhadap kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila Tahun 2010-2019 maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Variabel belanja modal tidak cukup mampu untuk menurunkan angka kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila dikarenakan porsi terhadap total belanja mayoritas daerah selama kurun waktu 10 tahun sangat kecil yaitu kurang dari 20% sehingga upaya dalam menstimulus perekonomian tidak tercapai secara optimal dan upaya penurunan angka kemiskinan juga tidak tercapai optimal.
- 2) Sumber daya manusia (SDM) yang ada di SWP Gerbangkertosusila memiliki kualitas, keterampilan, dan daya saing yang cukup mampu untuk menjadi subjek dan objek dalam kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut digambarkan melalui tingkat IPM mayoritas daerah yang masuk dalam kategori tinggi $70 \leq IPM < 80$ meskipun masih terdapat daerah yang berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur, yaitu Kab. Bangkalan.

- 3) Variabel TPT dalam penelitian ini tidak cukup mampu untuk menggambarkan angka kemiskinan yang terjadi karena mayoritas kemiskinan terjadi di daerah pedesaan (*rural*). Kondisi tersebut terjadi diakibatkan bahwa mayoritas pengangguran yang ada di daerah perkotaan (*urban*) bukan karena mengalami kemiskinan namun ada suatu hal tertentu, seperti melanjutkan studi sehingga terpaksa menganggur dan tetap mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar-nya.
- 4) Variabel Sektor Kunci dalam penelitian ini tidak cukup mampu dalam menggambarkan kemiskinan yang terjadi di SWP Gerbangkertosusila. Kondisi tersebut terjadi karena bahwa kawasan ini identik dengan kawasan industri dan jasa sedangkan kemiskinan yang terjadi Provinsi Jawa Timur adalah kemiskinan dengan karakteristik pedesaan atau *rural* sedangkan daerah di SWP Gerbangkertosusila mayoritas adalah perkotaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing pemerintah daerah khususnya daerah yang berada di SWP Gerbangkertosusila untuk lebih memperhatikan mengenai distribusi alokasi belanja daerah khususnya pos belanja modal untuk ditingkatkan persinya karena merupakan salah satu bagian dalam belanja langsung yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap penyediaan infrastruktur sehingga dana yang digunakan dalam proses pembangunan lebih besar yang diharapkan dapat menstimulus perekonomian dan meningkatkan produktivitas perekonomian.
- 2) Melakukan percepatan dalam IPM khususnya di daerah Kab. Bangkalan baik dari aspek pendidikan dan Kesehatan sebagai instrumen pembentuk IPM yang berpengaruh pada kualitas SDM. Upaya percepatan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan stimulus kepada masyarakat, misalnya dalam bidang Pendidikan seperti pemberian beasiswa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program sekolah gratis, dan sebagainya. Bidang Kesehatan juga dapat dilakukan dengan memberikan stimulus berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), peningkatan fasilitas dan alat kesehatan, dan sebagainya. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan SDM yang siap baik jasmani dan rohani.
- 3) Pemerintah masing-masing daerah khususnya daerah di SWP Gerbangkertosusila lebih terbuka serta memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan baik lokal ataupun asing untuk investasi dan membuka lapangan kerja baru dengan intervensi peraturan mengenai perekrutan tenaga kerja dengan memprioritaskan penduduk lokal agar mampu menyerap lebih banyak lagi pekerja lokal sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di suatu wilayah yang dalam penelitian ini terpusat di daerah perkotaan atau *urban*. Selain itu, juga perlu dilakukan pembangunan dari desa dengan menciptakan lapangan kerja baru di desa-desa dan pemberian bantuan dana usaha serta pelatihan keterampilan sehingga dapat meminimalisasi terjadi urbanisasi penduduk dari desa ke kota sehingga penciptaan kesejahteraan tercapai secara inklusif baik di desa dan kota.
- 4) Potensi dari masing-masing daerah harus lebih diidentifikasi secara optimal sehingga peran sektor kunci atau *key sector* dalam menciptakan kesejahteraan dapat tercapai secara inklusif dan tidak hanya terpusat pada beberapa orang atau golongan saja sehingga tujuan dari adanya SWP dalam rangka menurunkan kemiskinan dengan memanfaatkan *spread effect* daerah dapat tercapai, salah satunya dengan memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat agar memperoleh pekerjaan dan mendapatkan pendapatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan upaya pengentasan masalah kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 2016. *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- AT. Mosher. 1968. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta: Jayaguna
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Konsep/Penjelasan Teknis Tingkat Pengangguran Terbuka*. Dipetik November, 2020, dari Badan Pusat Statistik (bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Angka Harapan Hidup*. Dipetik Mei, 2021, dari Sistem Informasi Rujukan Statistik - View Indikator (bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Harapan Lama Sekolah*. Dipetik Mei, 2021, dari Sistem Informasi Rujukan Statistik - View Indikator (bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2021. *Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2021*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2021. *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Agustus 2020*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2021. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Dipetik Juli, 2021, dari BPS Provinsi Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. 2020. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2005-2018*. Dipetik Mei, 2021, dari Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. 2020. *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2002-2019 (%)*. Dipetik Oktober, 2020, dari Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. 2020. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2010-2020*. Dipetik Oktober, 2020, dari Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. 2020. *Persentase Penduduk Miskin-Kab/Kota, 2001-2020*. Dipetik Oktober, 2020, dari Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (bps.go.id)
- Deolalikar, A. B. 1997. *Human Resource Development and International Competitiveness in Asia*. Manila: Asian Development Bank. Dipetik Mei 10, 2020, dari https://www.researchgate.net/publication/44830541_Competitiveness_and_human_resource_development_in_Asia
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Fitriyah, L., & Rachmawati, L. 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Serta Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3)
- Halim, A., & Damayanti, T. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Kedua ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN

- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Haris, S. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*. Jakarta: LIPI Press
- Japan International Corporate Agency (JICA). 2011. *Studi untuk Merumuskan Rencana Tata Ruang Kawasan Gerbangkertosusila (GKS) di Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia*. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penataan Ruangan. Japan International Corporate Agency
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. 1994. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (2 ed.). (F. H. Basri, Penerj.) Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mankiw, G. N. 2006. *Principles of Economics: Pengantar Ekonomi Makro* (3 ed.). (C. Sungkono, Penerj.) Jakarta: Salemba Empat
- Ritonga, H. 2003. *Perhitungan Penduduk Miskin*. Jakarta: Badan Pusat Statistika (BPS)
- Simanjuntak, B. A. 2013. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dari Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sinaga, B. M., & Sitepu, R. K. (2012). Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium (The Impact Of Human Capital Investment On Economic Growth And Poverty In Indonesia: Computable General Equilibri. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. Dipetik Juli 2021, dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/view/4203>
- Sukirno, S. 1994. *Pengantar Ekonomi Makro* (3 ed.). Jakarta: Rajawali Press
- Tambunan, T. T. 2003. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (7th ed.). (H. Munandar, Penerj.) Jakarta: Erlangga
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (1 ed.). (H. Munandar, Trans.) Jakarta: Erlangga
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2008. *Pembangunan Ekonomi* (Vol. IX). Jakarta: Erlangga
- United Nation Development Programme (UNDP). 1990. *Human Development Report*. New York: Oxford University Press. Dipetik Mei 5, 2020, dari <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1990>